



Prosiding Seminar Nasional Manajemen

Vol 2 (2) Agustus 2023: 275-284

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index>

ISSN: 2830-7747; e-ISSN: 2830-5353



ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENILAIAN KINERJA APBD PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2020-2021

Mira Deliana¹, Didi Sujadi^{2*}, Holiawati³

^{1,2,3} Universitas Pamulang

e-mail: miradeliana@yahoo.com ; didisujadi984@gmail; dosen00011@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima 14 Agustus 2023 Disetujui 15 Agustus 2023 Diterbitkan 16 Agustus 2023</p>	<p>Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis rasio keuangan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah berupa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2020-2021. Sedangkan analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio kemandirian Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan daerahnya. Untuk rasio pertumbuhan APBD pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta rata-rata sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun kadang terjadi penurunan pada pendapatan. Dengan begitu kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil karena mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dalam periode tahun 2020-2021. Penulis menyarankan agar Provinsi DKI Jakarta menjalankan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat luas dimasa yang akan datang.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>ABSTRACT</i></p>
<p>Keywords: <i>Financial, Ratios, Effectiveness, Growth</i></p>	<p><i>This study aims to analyze financial ratios in the DKI Jakarta Provincial APBD in managing regional finances. This study uses a quantitative descriptive analysis technique. The type of data used is in the form of regional financial accountability reports (APBD) for the 2020-2021 fiscal year. While the analysis of financial ratios used in this study is in the form of ratios of independence, ratios of effectiveness and efficiency of Local Own Revenue, compatibility ratios, and growth ratios. The</i></p>

results of the calculation of the independence ratio for DKI Jakarta Province for the 2020-2021 Fiscal Year show that the regional financial independence of DKI Jakarta Province can be said to be completely independent in meeting the needs of its region. For the regional government budget growth ratio of the DKI Jakarta Province, on average, it has shown positive growth, although sometimes there has been a decline in income. In this way, the performance of the DKI Jakarta Provincial Government can be said to be successful because it is able to maintain and increase the success achieved in the 2020-2021 period. The author suggests that DKI Jakarta Province implement the applicable laws and regulations which will ultimately affect the development of economic facilities and infrastructure for the wider community in the future.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada tahun 1999 mulai diberlakukannya otonomi daerah, dikarenakan hal ini pemerintah daerah memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan. Di masa orde reformasi yang dimulai pada sejak tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dengan pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran
Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 4. Laporan Operasional
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 5. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi

Pada tahun anggaran 2020, LKPD Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, Bahrullah Akbar mengatakan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang secara materiil tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. "Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, yang secara materiil tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD, tetapi tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan kedepannya," ungkap Anggota V BPK. Lebih lanjut, Anggota BPK menyampaikan, bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan LHP LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemprov DKI tentang program penyediaan perumahan rakyat. Pemeriksaan tersebut yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2018 - 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bahrullah mengungkapkan, bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyediakan unit hunian untuk MBR masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan signifikan. Permasalahan tersebut di antaranya, ditemukan pada hunian yang sudah dibangun, yaitu: kondisi hunian tidak layak, tipe hunian yang tersedia tidak sesuai kebutuhan MBR, dan keterbatasan akses pemilikan Rumah Susun Milik/Sewa (RSM/S) yang belum dijematani. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. IHPD ini berisi ringkasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2020 pada beberapa satuan kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. (BPK RI, 2021)

Berdasarkan fenomena diatas, maka perlu untuk mempertahankan laju pembangunan daerah lebih optimal, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penggalan dan pemanfaatan secara komprehensif sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah yang tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik secara efektif dan efisien dibutuhkan pengembangan fungsi pengawasan maupun sistem pengendalian secara sistematis, hal ini tentu dibutuhkan berbagai informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan suatu penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Analisis Keuangan

Analisis keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut (Sujarweni, 2017) analisis laporan keuangan adalah upaya untuk menganalisis kondisi keuangan entitas, hasil kerja entitas pada masa lalu & estimasi masa mendatang untuk mengetahui kinerja entitas hingga saat ini dan mengestimasi pada waktu ke depan. Perihal analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dan menurut (Halim & Kusufi, 2012) penilaian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Selanjutnya (Marsela, Soselia, Nigrum, Pangestu, Lero, & Kristanti, 2023) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintahan dengan menggunakan rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Maluku dalam hal tingkat kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan pengelolaan yang sangat efektif, efisien, rasio aktivitas yang belum seimbang antara belanja operasi dengan belanja modal, dan pertumbuhan yang sangat rendah.

Kemudian hasil penelitian (Siregar & Mariana, 2020) bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan cukup dikarenakan karena rata-rata rasio nya masih berada di interval 30,01% - 40,00%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan sedang karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena rata-rata efektivitas nya sudah melebihi 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai cukup efisien karena masih berada pada interval 80%-90%. Rasio keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi kecil.

Sedangkan (Amal & Wibowo, 2022) mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19. Dan (Fathah, 2017) mengemukakan dalam penelitiannya menunjukkan keuangan kinerja Kabupaten Gunungkidul dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan efektif, karena efektivitasnya rata-rata sebesar 131,8% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien karena besarnya rata-rata rasio ini sebesar 109,8%. (3) Rasio Kesesuaian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan paling banyak dari anggarannya untuk belanja operasional daerah yang rata-rata sebesar 71,26% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 9,92%. (4) Rasio Pendapatan Pertumbuhan, Pendapatan, Pengeluaran Operasional selalu meningkat dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal adalah volatile (5) Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rasio rata-rata 10%.

B. Penerapan Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur dan demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021. Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Adapun metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari website resmi PPID DKI Jakarta yaitu mengenai Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Efektivitas PAD
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi, Misi dan Sasaran Biro Keuangan

Visi

- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi secara optimal

Misi

1. Pemberdayaan aparatur secara optimal;
2. Menciptakan dan mempertahankan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah;
3. Menyempurnakan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Menerapkan Sistem Akuntansi Pengendalian Anggaran;
5. Melaksanakan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Bidang Keuangan ke lima wilayah kota dan Satu Kabupaten Administratif.

Sasaran Strategis

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Restrukturisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Standarisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Pelaksanaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabilitas
5. Peningkatan Pelayanan Menuju Pelayanan Prima
6. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah
7. Pengalokasian Dana Secara Proporsional
8. Pendelegasian Wewenang Daerah

Untuk perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 1 Perkembangan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020-2021

(Dalam Rupiah)

No.	Pendapatan	2020	2021
1.	PAD (Pendapatan Asli daerah)	37.414.754.711.193	41.606.307.405.630
2.	Dana Perimbangan	16.897.722.313.632	22.630.423.484.052
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bantuan)	1.509.350.237.902	1.286.907.449.318
a. Jumlah Pendapatan APBD (1+2+3)		55.821.827.362.737	65.523.638.339.000

No.	Belanja	2020	2021
1.	Belanja Operasi	43.835.699.863.256	53.925.743.776.335
2.	Belanja Modal	3.173.223.520.882	6.865.827.016.719
3.	Belanja Tak Terduga	4.707.937.545.524	439.889.457.199
b. Jumlah Belanja APBD		51.716.860.929.662	61.231.460.250.253
Surplus (a – b)		4.105.966.433.075	4.292.178.088.747

Sumber Data: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

PAD : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dana Perimbangan : Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi khusus

Rasio kemandirian pemprov DKI Jakarta dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat mencapai 67,03 % pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 Rasio kemandirian pemprov DKI mencapai 63,50% ,sehingga pemrov DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan daerahnya.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**Tabel 2 Biaya, Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Dispenda Provinsi DKI Jakarta**

No.	Keterangan	Tahun Anggaran 2020		Tahun Anggaran 2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	PAD	32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175
2.	Retribusi Daerah	468.413.750.000	496.332.944.408	755.755.000.000	383.859.710.282
	Jumlah	32.948.413.750.000	32.391.596.222.031	37.970.755.000.000	34.959.422.929.457
	Jumlah Belanja (Modal)	-	3.173.223.520.882	-	6.865.827.016.719
	Rasio Efektivitas	-	0,98	-	0,92
	Rasio Efisiensi	-	0,1	-	0,2

Sumber Data : Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2020-2021

Rasio efektivitas pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan PAD tahun 2020 mencapai 98% dan tahun 2021 mencapai 92%. Hal ini membuktikan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan belum efektif, karena rasio yang dicapai belum memenuhi batas minimal sebesar satu atau 100 persen. Karena APBD yang telah dianggarkan pemprov DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan realisasinya maka persentase rasio tidak mencapai sampai 100 persen. Sedangkan untuk perhitungan rasio efisiensi tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar 10%-20%, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan pendapatan yang ada di pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan efisien. Efisien dapat dikatakan apabila, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah provinsi semakin baik.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasidannya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Dan Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{rasio belanja operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian dibagi menjadi Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi Pemprov DKI dari tahun 2020 -2021 mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebesar 85% menjadi 88% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2011 menjadi 71,49%, dan pada tahun 2012 turun menjadi 71,12%. Kenaikan rasio belanja operasi di Pemprov DKI tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3% per tahun.

Kemudian rumus rasio belanja modal sebagai berikut :

$$\text{rasio belanja modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal di Pemprov DKI mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 dari 6% menjadi 11% Tahun 2021. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi

sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja Barang dan Jasa yang relatif besar, Pemprov DKI lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemprov DKI kecil. Untuk itu, ke depannya Pemprov DKI diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 3 Rasio Perhitungan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 – 2021
(Dalam Rupiah)

No.	Keterangan	2020	2021
1	PAD	7.817.545.125.277,53	8.198.961.140.384,85
2	Pertumbuhan PAD	-	4,88%
3	Total Pendapatan	14.337.618.501.100,53	13.892.169.205.048,85
4	Pertumbuhan Pendapatan	-	(3,11%)
5	Belanja Rutin	5.025.977.951.358,80	5.520.797.189.413,00
6	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	9,85%
7	Belanja Pembangunan	10.135.599.844.847,00	12.401.241.742.664,00
8	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	-	22,35%

Sumber Data : Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2020-2021

Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil masing-masing analisis rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut : Untuk analisis rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan persentase sebesar 4,88%, analisis rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan persentase sebesar 3,11%, analisis rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan persentase sebesar 9,85%, dan analisis rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami persentase kenaikan sebesar 22,35%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dalam merealisasikan PAD tahun 2020 mencapai 98% dan tahun 2021 mencapai 92%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan belum efektif, karena rasio yang dicapai belum memenuhi batas minimal sebesar satu atau 100 persen.
2. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yaitu rasio efisiensi tahun 2020 dan 2021 hanya berkisar 10%-20%, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan pendapatan yang ada di

pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan efisien. Efisien dapat dikatakan apabila, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemprov semakin baik.

3. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian yaitu Rasio Belanja Operasi Pemprov DKI dari tahun 2020 -2021 mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebesar 85% menjadi 88% di tahun 2022. Kemudian di tahun 2011 menjadi 71,49%, dan pada tahun 2012 turun menjadi 71,12%. Kenaikan rasio belanja operasi di Pemprov DKI tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3% per tahun.
4. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif yaitu rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan persentase sebesar 4,88%, analisis rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan persentase sebesar 3,11%, analisis rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan persentase sebesar 9,85%, dan analisis rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami persentase kenaikan sebesar 22,35%.
5. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu kemandirian pemprov DKI Jakarta dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat mencapai 67,03 % pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 Rasio kemandirian pemprov DKI mencapai 63,50% ,sehingga pemrov DKI Jakarta sepenuhnya dapat dikatakan mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan daerahnya.

REFERENSI

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1*, 83-93.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK ▪ Vol.8 ▪ No. 1* , 33 - 48.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* . Jakarta: Salemba Empat.
- Mira Deliana, Krisnaldy (2017). *Analisis Raso Keuangan Pemprov DKI Jakarta*: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marsela, D., Soselia, K. E., Nigrum, C. S., Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *JRAK, Volum 19*, 1-16.
- Siregar, A. O., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok - Jawa Barat. *Journal IMAGE | Volume 9*, 1-19.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, aplikasi, & hasil penelittian*. Yogyakarta: Pustaka baru press.